

Vol. 2, No. 1, November 2015

ISSN: 2407-1757

METAFORA

EDUCATION, SOCIAL SCIENCES, AND HUMANITIES JOURNAL



Diterbitkan:

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

METAFORA	Vol. 2	No. 1	Hlm. : 01 - 89	Surabaya November 2015	ISSN: 2407 - 1757
----------	--------	-------	----------------	---------------------------	----------------------

METAFORA

EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES JOURNAL

Volume 2, Nomor 1, November 2015 . ISSN : 2407-1757

Jurnal **METAFORA** Education, Social Sciences, and Humanities adalah wadah informasi bidang pendidikan, ilmu sosial, dan humaniora berupa hasil penelitian, hasil studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2014 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan November dan bulan April.

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Penanggung Jawab

Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Pemimpin Redaksi

Agus Suprijono

Redaksi Pelaksana

Sugeng Harianto

Ari Wahyudi

M. Jacky

Moh. Mudzakkir

Arief Sudrajat

Pelaksana Tata Usaha

Tri Joko Martono

Alamat Redaksi :

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang Surabaya 60231

Telp. 8280009 Pes.400/410

Fax. 031 8281466

Laman : <http://www.fish.unesa.ac.id>

E-mail : fsunesa@gmail.com

METAFORA

EDUCATION, SOCIAL SCIENCES, AND HUMANITIES JOURNAL

Volume 2, Nomor 1, November 2015, Hal 1-89. ISSN: 2407-1757

DAFTAR ISI

- Peningkatan Hasil Belajar IPS tentang Jenis-Jenis Pekerjaan melalui Metode *Cooperative Learning Tipe Inside-Outside Circle (IOC)* di Kelas III SDN Karet 06 Pagi Jakarta Selatan 1 - 8
Ajat Sudrajat (PGSD Universitas Negeri Surabaya)
- Analisis Kompetensi Akuntansi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung 9 - 16
Pujiati (FKIP Universitas Lampung)
- The Effectiveness of Media Rembuk Pekon in Preventing Conflict in Pekon Way Suluh Krui Selatan Pesisir Barat Lampung 17 - 29
Hermi Yanzi (PS. PPKn FKIP Universitas Lampung)
- Metode Sejarah Lisan dan Historiografi Periode Jepang di Pulau Morotai 30 - 39
Irwan Abbas (Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate)
- Pengguna Perpustakaan di Era Digital dalam Perspektif Fenomenologi 40 - 59
Liliek Soetjiatie (Poltekkes Kemenkes Surabaya)
- Kepemimpinan Kyai dalam Pengembangan Organisasi Ekonomi di Pondok Pesantren 60 - 71
Supriyanto (Prodi Pendidikan IPS, Program Pascasarjana Universitas Kanjuruhan Malang)
- Penerapan Model Group Investigasi dengan Media Film untuk Meningkatkan Kesadaran dan prestasi belajar (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 1 Gedangan – Kabupaten Sidoarjo) 72 - 82
Abdul Awwalim (Guru SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
- Solusi Kampanye Terselubung di Hari Tenang Pemilu 83 - 89
Agus Machfud Fauzi (Universitas Negeri Surabaya)

THE EFFECTIVENESS OF MEDIA REMBUK PEKON IN PREVENTING CONFLICT IN PEKON WAY SULUH KRUI SELATAN PESISIR BARAT LAMPUNG

Hermi Yanzi

Dosen PS.PPKn FKIP Universitas Lampung

Email: sinarbanten1@yahoo.co.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas media rembuk pekon sebagai upaya pencegahan konflik di Pekon Way Suluh Pesisir Barat Lampung. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk saling mengusahakan rembuk pekon sebagai upaya pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, agar tercipta harmonisasi sosial yang baik dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian aparat pekon, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan media rembuk pekon sangat efektif membantu warga dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik ditengah masyarakat, mampu memediasi dalam penyelesaian masalah sosial seperti; perkelahian, salah paham, main hakim sendiri, perbuatan asusila, pencurian, dan pencemaran nama baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media rembuk pekon efektif sebagai media dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Saran yang dapat diajukan adalah menginternalisasikan media "rembuk pekon" di lingkungan masyarakat dengan mensinergikan peran lembaga-lembaga sosial seperti; aparat pekon, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama.

Kata kunci : media rembuk pekon, konflik

Abstract : This research attempts to examined the effectiveness of media rembuk pekon as prevention conflict in Pekon Way Suluh Krui Selatan Pesisir Barat Lampung. Practically as a input for the local government and society for mutual operate rembuk pekon as conflict prevention, the termination of conflict, in order to keep social harmonisation good in solving problems in the society. This research using qualitative descriptive method with the subject of research pekon officials, society personage, custom personage, and the youth. Collected data technique is interview guidelines to be supported by guidelines observation and documentation. While analysis data using the credibility with triangulation. This research result indicates media of rembuk pekon very effective help people prevention, termination, and recovery post conflict in the societies, able to mediate in the resolution of social problems such as fights, misunderstand, a vigilante, immoral, theft, and defamation. In conclusion that the media rembuk pekon is effective as the media in the solution of social problems that happens in society. Suggestion in ask is internally media rembuk pekon in society with the role of social institutions such as pekon officials, society personage, custom personage, and the youth.

Key words: conflict, media of rembuk pekon

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik Indonesia adalah sebagai bangsa yang plural. Indonesia merupakan Negara yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa, dan 17.508 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keadaan demikian menyebabkan Negara Indonesia merupakan negara yang sangat heterogen, plural dan multi etnis. Dalam mengelola kemajemukan masyarakat tersebut, Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Negara-negara barat relatif masih baru mewacanakan hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan *Multikulturalisme*, jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai penanda bahwa Indonesia telah mencirikan diri sebagai bangsa yang multikultur.

Semboyan tersebut merupakan suatu bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah menyadari kemajemukannya bangsa Indonesia, dan semboyan tersebut dijadikan sebagai pengikat dan pemersatu bangsa dalam bingkai ideologi Pancasila. Kemajemukan bangsa Indonesia juga kemudian menjadi karakteristik tersendiri bagi bangsa Indonesia yang menciptakan ragam warisan budaya dan tradisi dari setiap daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi generasi muda penerus bangsa, dan keragaman tersebut memposisikan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain.

Selain menjadi karakteristik bagi Indonesia, sisi lain kemajemukan tersebut juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang menjadi penciri dan kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus juga merupakan tantangan. Dikatakan demikian karena, kemajemukan suatu bangsa rentan menimbulkan permasalahan, pertentangan, perbedaan bahkan konflik sering terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, secara alamiah manusia yang juga disebut sebagai makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dengan keadaan demikian, kondisi bangsa Indonesia yang plural sangat rentan terjadi konflik.

Konflik itu sendiri menurut Soerjono Soekanto (2009), “konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan”. Sesuai pengertian tersebut yang berhubungan dengan pekon Way Suluh terjadinya konflik tidak terelakkan lagi, dampak Globalisasi juga memberikan sumbangsih dalam memicu terjadinya konflik. Meskipun tidak secara langsung, dampak globalisasi menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas dan multi dimensi. Selain itu nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya rasa toleransi terhadap keberagaman kian menurun. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Keadaan yang demikian semakin diperkuat dengan perubahan zaman yang semakin pesat, dimana keberagaman secara vertikal semakin bertambah. Perbedaan keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, dan jabatan yang sering menyebabkan kesenjangan antar individu dalam masyarakat dan memungkinkan terjadi kejahatan pada lapisan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan sikap yang mudah merampas hak orang lain, seperti: menjarah hak orang lain, main hakim sendiri, melanggar peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosi, mudah diombang-ambingkan dan perbuatan lain yang merugikan orang lain atau diri sendiri.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti; pertikaian antar suku di Ambon, penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah di Jawa Barat, saling serang antar desa dan termasuk perselisihan antar suku di Lampung merupakan bukti masyarakat semakin sulit menerima perbedaan. Ketidakmampuan masyarakat sekarang ini bukan hanya dalam menerima perbedaan secara vertikal, namun masyarakat juga mulai sulit menerima perbedaan secara horizontal, seperti; keberagaman suku, agama, dan ras yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Selain itu, persebaran masyarakat suku yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik di daerah yang memiliki heterogenitas masyarakat yang tinggi.

Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki keberagaman masyarakat yang sangat tinggi. Hampir 70% masyarakat di Lampung merupakan pendatang dan imigran. Hal tersebut menyebabkan masyarakat provinsi Lampung sangat heterogen, terdiri dari berbagai macam suku. Meskipun persebaran para imigran tersebut tidak merata di seluruh wilayah Lampung, tetapi terdapat beberapa wilayah di provinsi Lampung yang memiliki heterogenitas tinggi, salah satunya Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan observasi pra-penelitian diperoleh data berdasarkan kultur penduduk. Suku Jawa berkisar antara 32%-37%, Suku Padang berkisar antara 5%-10%, Suku Bali berkisar antara 8%-12%, Suku Batak berkisar antara 3%-8%, dan Suku Lampung sendiri berkisar antara 37%-42%. Persebaran masyarakat antar suku tidak merata atau dapat dikatakan ber-*blok*. (Hasil Observasi Peneliti Tahun 2015).

Selain itu, sejalan dengan penelitian yang relevan yang pernah dilaksanakan oleh peneliti, yang berjudul "Peranan Media Rembuk Pekon dalam Penyelesaian Masalah Sosial Pasca Konflik di Pagelaran" (Jurnal: JPP Universitas Lampung, Vol.3 No.7 hal.6) menjadi acuan bahwa letak pekon Way Suluh dan kondisi masyarakat mirip dengan Pagelaran. Dimana kedua lokasi tersebut memiliki letak lokasi yang strategis yang mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai macam profesi, yang juga menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan, perbedaan tingkat pendidikan, dan tingkat status sosial masyarakat. Secara aspek geografis, sosial, dan ekonomi, Pekon Way Suluh ini sangat mirip dengan desa Balinuraga, dimana masyarakatnya memiliki heterogenitas tinggi namun menungkinkan antar suku tidak dapat bergaul dan saling mengenal satu sama lain karena, sistem persebaran penduduk yang ber-*blok*. Hal tersebut memungkinkan terjadinya konflik seperti; di Balinuraga, saling serang antar Suku Jawa dan Suku Bali, saling serang antar desa di Mesuji, pertikaian antar remaja di Semaka, bentrok warga di Lampung Selatan, kemudian di susul konflik warga di Pagelaran kabupaten Pringsewu. Berbagai konflik antar warga di Lampung menunjukkan terdapat masalah sosial berupa kesenjangan baik vertikal maupun horizontal yang serius. Oleh karena itu perlu upaya pendewasaan, pemberdayaan dan sikap toleran yang tinggi pada masyarakat seperti ini.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti merasa sangat perlu melakukan upaya pencegahan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, aparatur pekon, dan masyarakat di Pekon Way Suluh dengan manajemen konflik. Salah satu manajemen konflik yang dapat dilakukan dengan memfasilitasi komunikasi atau membuka jalur komunikasi (Alo Liliweri, 2014). Hal tersebut dapat dilakukan dengan media Rembuk Pekon. Rembuk pekon memiliki arti berunding, berbincang-bincang, atau wakil kelompok yang sedang bersengkata. Media rembuk pekon diharapkan mampu

mencegah bahkan mengatasi peristiwa konflik baik skala kecil atau skala besar yang memerlukan peran aparat pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat/agama untuk saling mengarahkan penyelesaian konflik dan pencegahannya secara sistematis dan dapat dikelola secara baik agar sama-sama mendapatkan titik temu dalam penyelesaiannya.

Sejalan dengan upaya pencegahan konflik tersebut, pemerintah daerah propinsi Lampung mengupayakan penyelesaian masalah melalui media rembuk pekon. Hal tersebut dicanangkan oleh Kapolda Lampung dan berbagai tokoh masyarakat untuk melaksanakan rembuk pekon. Aturan tentang rembuk pekon juga selaras dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Konflik Sosial, dinyatakan bahwa: "Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik"

Banyak usaha yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik, agar tidak berujung pada bentrok fisik. Konflik cukup matang dalam negosiasi penyelesaian jika berada dalam kondisi tertentu, kondisi utamanya adalah jalan buntu saling melukai. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan kekerasan dan bahwa kekerasan memerlukan biaya yang sangat besar untuk dilanjutkan. Selanjutnya agar negosiasi berhasil maka harus ada juru bicara yang diakui dari masing-masing pihak yang bertikai, harus ada batas waktu dan sebuah visi terhadap kompromi yang dapat diterima.

Persoalannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan konflik dimasyarakat sebagai akibat perubahan yang tak terelakan. Salah satu pihak yang diminta pertanggung jawaban dari persoalan tersebut adalah pemimpin dari masyarakat yang bersangkutan. Pemimpin dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memimpin dituntut harus mampu mengelola konflik ataupun potensi konflik yang ada pada masyarakat sebagai dampak atau konsekuensi dari perubahan yang terjadi dimasyarakat. Tidak ada masyarakat yang terlepas dari konflik, konflik merupakan keniscayaan yang ada atau melekat didalam masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada asumsi yang antara lain menyatakan bahwa masyarakat selalu berubah, dan masyarakat yang mengalami perubahan didalamnya terdapat konflik. Benturan kepentingan atau kebutuhan mulai nampak terutama pada masyarakat yang relatif plural. Semakin plural suatu masyarakat kecenderungan untuk munculnya benturan yang semakin sering, dalam hal mencapai kesepakatan tersebut. Konflik yang mungkin hadir sebagai konsekuensi perubahan yang dirancang paling tidak dapat dicermati sebagai konflik permukaan, konflik terpendam maupun konflik terbuka.

Upaya untuk mencegah atau mendamaikan konflik antar warga diperlukan seorang yang dapat menjadi penengah antar kedua belah pihak, salah satunya yaitu kepala pekon. Kepala pekon merupakan orang yang memiliki Efektivitas dan dihormati oleh masyarakat karena kedudukannya sebagai pemimpin di pekon. Beliau dianggap sebagai seorang pemimpin yang berperan dalam memediator penyelesaian-penyelesaian masalah masyarakat melalui mediasi atau musyawarah antar pekon. Kepala pekon dituntut mempunyai kedudukan yang netral dan harus sama-sama mencari solusi titik temu yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai sosok pemimpin yang dianggap mempunyai efektivitas dan pengaruh di wilayah pekon, kepala pekon menjadi seseorang yang selalu dimintai solusi dalam penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat sekaligus sebagai

jalan mediator. Misalnya; dalam proses konflik yang terjadi antar pemuda desa agar tidak berkepanjangan dan tidak menyebar kemasyarakat yang lain harus adanya manajemen konflik yang baik untuk mengatasinya.

Pesan UU No. 7 Tahun 2012 tersebut dapat dimaknai bahwa penanganan dan pencegahan konflik di dalam masyarakat sangat perlu adanya media, efektivitas pemimpin dan tokoh masyarakat dalam mewedahi, memfasilitasi dan mengantisipasi konflik yang terjadi didalam masyarakat, ini semua bukan hanya tanggung jawab pihak satuan hukum tetapi juga para petinggi masyarakat didalamnya.

Program rembuk **pekon** diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat agar tidak meluas dan memerlukan biaya yang besar dalam penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan sosial ditengah masyarakat tidak selalu dapat terselesaikan dengan penegakan proses hukum. Namun terkadang permasalahan sosial di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui harmonisasi sosial dalam musyawarah. Peran kepala pekon dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting. Karena mereka dianggap sebagai seseorang yang mempunyai peran dalam harmonisasi sosial dalam musyawarah antar pekon. Pelayanan yang diberikan akan langsung bersinggungan dengan masyarakat dan mudah diterima, diharapkan akan dapat membantu setiap penyelesaian persoalan sosial ditengah masyarakat.

Program rembuk pekon ini dapat digalakkan oleh kepala pekon dengan cara media sosialisasi. Kepala pekon, aparatur pekon, dan tokoh masyarakat harus sering mensosialisasikan kepada warganya agar setiap ada permasalahan di dalam masyarakat lebih baik diselesaikan dengan jalur musyawarah tetapi ada beberapa warganya yang tidak peduli dan sering menggunakan jalur kekerasan ketika ada permasalahan tanpa memahami dampak yang lebih buruk bagi mereka. Sosialisasi ini harus tepat sasaran yaitu pada seluruh lapisan masyarakat khususnya usia muda, karena usia muda terkadang mudah terprofokasi dan emosional. Untuk pemuda harus dibina dan diarahkan agar meminimalisir konflik yang terjadi dalam masyarakat. Menurutnya kepolisian setempat atau babinkamtibmas (Bintara pembinaaan dan keamanan ketertiban masyarakat) juga selalu mengingatkan untuk selalu mengusahakan rembuk pekon dengan adanya program satu desa satu petugas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terapan di pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dengan judul penelitian "Efektivitas Media Rembuk Dalam Upaya Pencegahan Konflik di Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat". Sebagai salah satu rujukan peneliti sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Hermi yang berjudul "Peranan Media Rembuk dalam Penyelesaian Masalah Pusca Konflik di Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2015" (Jurnal: JPP Universitas Lampung, Vol.3 No.7 hal.6).

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat di pekon tersebut untuk dapat melaksanakan rembuk pekon. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mendampingi masyarakat dalam membuat media rembuk pekon, cara melaksanakan rembuk pekon, dan sosialisasi pentingnya rembuk pekon kepada masyarakat. Keberlanjutan dari penelitian ini adalah program rembuk pekon yang dilaksanakan setiap minggu oleh masyarakat Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dimana tujuan rembuk pekon bukan hanya untuk membahas mengenai konflik, tetapi juga tentang program desa dan kegiatan sosial yang lebih mengutamakan

terjalinnnya hubungan antarwarga. Program kegiatan rembuk pekon yang dilaksanakan secara kontinu diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas media rembuk pekon dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai upaya Pencegahan Konflik Di Pekon Way Suluh Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk saling mengusahakan rembuk pekon dalam peristiwa sebelum terjadi atau terjadi konflik sehingga tercipta harmonisasi sosial yang baik dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2012:9), "penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya"

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pekon Way Suluh dan Way Jambu Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat heterogen dan memungkinkan terjadinya konflik. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah aparat desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat desa dan masyarakat yang pernah mengalami konflik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator. Untuk menguji kredibilitas data penelitian ini menggunakan Triangulasi yaitu penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik analisis ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (Haris Herdiyansyah, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkumpul, maka data berupa informasi dan fakta dikelompokkan ke dalam beberapa indikator penelitian antara lain, media *rembuk pekon* sebagai pengambil keputusan, media *rembuk pekon* sebagai pengatur strategi, media *rembuk pekon* sebagai komunikator dan mediator, media *rembuk pekon* sebagai pemberdayaan, dan media *rembuk pekon* mengutamakan mediasi sesudah atau sebelum terjadinya konflik. Kemudian untuk pengukuran terhadap efektivitas yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan kegiatan
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh (Campbell, 1989 : 121)

Berdasarkan Lima cara pengukuran terhadap efektivitas tersebut, maka dalam pelaksanaan kegiatan *rembuk pekon*, pengukuran terhadap efektivitas dapat dilihat melalui indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas, indikator ini menunjukkan standar kualitas dari kegiatan *rembuk pekon*. Misalnya, apakah media *rembuk pekon* sudah tepat sasaran.
- b. Dampak, indikator ini melihat apakah kegiatan *rembuk pekon* yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan dan manfaat di masyarakat.
- c. Waktu, indikator ini melihat apakah kegiatan *rembuk pekon* yang merupakan ketepatan waktu dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan indikator tersebut, untuk menentukan klasifikasi efektivitas setiap indikator, peneliti menggunakan triangulasi untuk melihat kesesuaian data (keautentikan) dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari triangulasi tersebut kemudian peneliti melakukan pembahasan hasil penelitian setiap indikator.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian diolah sesuai dengan variabel penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk data deskriptif sebagai berikut:

Media Rembuk Pekon Sebagai Pengambil Keputusan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan *rembuk pekon* pada dasarnya sama dengan kegiatan musyawarah desa. Dalam kegiatan musyawarah pasti diharapkan menghasilkan keputusan yang mufakat. Seperti halnya musyawarah desa, media *rembuk pekon* juga dirapkan dapat menampung aspirasi warga masyarakat dan menghasilkan keputusan yang mufakat. Sesuai dengan sila ke-4 yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam kegiatan ini seharusnya aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga seharusnya berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah. Seluruh komponen tersebut diharapkan mampu memberikan pendapat dalam kegiatan musyawarah, dan menerima keputusan yang telah disepakati. Pada indikator ini peneliti akan melihat apakah media

rembuk pekon berfungsi sebagai pengambil keputusan sesuai prinsip sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan media rembuk pekon di Pekon Way Suluh pada dasarnya sudah memenuhi prinsip tersebut. Hal tersebut dapat diamati dengan item pertanyaan wawancara "*Apakah Bapak melibatkan warga dalam pelaksanaan rembuk pekon?*" yang ditujukan pada aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Berdasarkan hasil wawancara tentang item tersebut, peneliti mencatat beberapa informasi dari berbagai informan, seperti tokoh adat menyatakan bahwa "*...ya, kami selalu melibatkan warga tapi mungkin tidak semua, hanya orang tua saja*". Kemudian peneliti melakukan konfirmasi pada tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa "*...kadang kami melibatkan warga, terutama pemuda sering juga kami libatkan, tapi tergantung juga masalah apa yang akan dibahas dalam rembuk pekon*". Sejalan dengan pernyataan tersebut, tokoh masyarakat juga menjawab "*...selalu melibatkan, baik orang tua dan pemuda, bahkan kadang ibu-ibu juga terlibat kalo ada kumpulan rembuk pekon. Meskipun kadang ada banyak warga yang ga mau hadir*".

Pelaksanaan media rembuk pekon pada indikator pengambilan keputusan berdasarkan wawancara dan konfirmasi antar sumber sudah dilaksanakan sesuai prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal ini semua warga dilibatkan dan hasil keputusan dapat diterima. Penjabaran tersebut menjadi dasar peneliti dalam menentukan efektivitas pelaksanaan rembuk pekon sebagai pengambil keputusan. Dari segi kualitas, pada indikator sudah tepat sasaran. Terbukti dengan dilibatkannya warga pada setiap kegiatan diskusi dan warga memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari segi dampak, pengambilan keputusan sangat memberikan dampak bagi warga. Hal tersebut pengambilan keputusan pada media rembuk pekon dapat diterima oleh warga. Selain itu, kegiatan pengambilan keputusan bukan hanya untuk menangani konflik, melainkan dalam berbagai hal seperti misalnya pembahasan anggaran desa, iuran desa, program desa, sosialisasi kesehatan, dan lain-lain. Dari segi waktu pengambilan keputusan dalam rembuk pekon dikatakan sudah sangat efisien karena semua warga saling bertatap muka, dalam penyampaian apabila hal itu sifatnya informasi tidak perlu berulang kali. Pengambilan keputusan terhadap konflik antarwarga diselesaikan dengan cepat, dengan cara kekeluargaan sehingga konflik tersebut tidak berlarut-larut.

Berdasarkan indikator efektivitas tersebut, pengambilan keputusan dalam media rembuk pekon di Pekon Way Suluh meskipun sudah dapat dikatakan baik. Namun masih perlu ada perbaikan, mengingat bahwa masih terdapat warga yang cenderung apatis untuk mengikuti kegiatan rembuk pekon. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya menggunakan media rembuk pekon sebagai wadah dalam mengatasi konflik menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian konflik itu sendiri. Hal tersebut biasa terjadi oleh warga yang belum mempunyai pemikiran yang matang dan mempunyai tingkat emosi yang tinggi menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak langkah yang diambil dalam proses penyelesaian konflik.

Kendala-kendala tersebut seharusnya dapat diminimalisir dengan meningkatkan peran beberapa pihak. Terutama bagi aparat desa yang dalam hal ini memiliki peran dan fungsi mengayomi warga masyarakat. Oleh karena itu hendaknya aparat pemerintah, kepolisian, kepala pekon dan lembaga lembaga yang ada dimasyarakat mengajak dan mensosialisasikan rembuk pekon sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan ketika terjadi permasalahan sosial dalam masyarakat.

Media Rembuk Pekon Sebagai Pengatur Strategi

Pada indikator ini media rembuk pekon diharapkan dapat menjadi pengatur strategi. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga pemerintah dan aparat pekon. Lembaga pemerintah dan aparat pekon diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat agar melaksanakan kegiatan musyawarah kekeluargaan sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik. Upaya tersebut serta merta didorong dengan kegiatan manajemen konflik. Kegiatan tersebut dapat menjadi strategi dari berbagai pihak untuk mencegah konflik atau penyelesaian konflik.

Bedasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak, pelaksanaan media rembuk pekon sebagai pengatur strategi sudah berjalan dengan baik. Observasi lapangan dan wawancara kepada aparat pekon, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasil wawancara dengan item pertanyaan sesuai indikator, antara lain "*Bagaimana upaya Bapak menyikapi atau menyiasati masalah sosial yang sering muncul di Pekon Way Suluh?*". Hasil wawancara aparat pekon, menyatakan bahwa "*...kalo udah terjadi pertikaian ya paling kami datangkan kedua orang tua, bicarakan baik-baik mencari solusi dan diselesaikan secara kekeluargaan*". Sejalan dengan pernyataan tersebut, tokoh adat menyatakan bahwa "*...upaya yang dilakukan tokoh adat ya jadi penengah agar kedua belah pihak berdamai, tapi biasanya agar tidak terjadi konflik memang perlu dilakukan pertemuan antar pemuda agar saling kenal, penyebab permusuhan itu kan karena tidak kenal*". Selain itu tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa "*...kami selalu memediasi setiap terjadi konflik*".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa aparat pekon sudah melaksanakan manajemen konflik yang berarti bahwa lembaga tersebut melaksanakan tugas sebagai pengatur strategi. Apabila pertikaian masih dalam kategori ringan, misalnya berkelahi. Dalam menanggapi permasalahan dalam tersebut, aparat pekon dengan menjadikan rembuk pekon sebagai salah satu cara dalam meredakan konflik yang memberikan keputusan secara kekeluargaan dan menghindari penyelesaian dengan jalur hukum. Keputusan tersebut tentunya diperoleh secara mufakat antar kedua belah pihak sehingga upaya pencegahan dan penyelesaian masalah dapat berjalan dengan lancar.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi acuan bagi peneliti untuk menilai bahwa efektivitas media rembuk di Pekon Way Suluh sudah berjalan dengan baik. meskipun sudah dapat dikatakan baik. Dari segi kualitas, pada indikator pengatur strategi, aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah melakukan langkah pencegahan dan penyelesaian. Maka pada kualitas rembuk pekon sebagai pengatur strategi sudah tepat sasaran. Dari segi dampak, strategi yang dilakukan oleh aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk upaya preventif memberikan pengaruh bagi warga untuk terhindar dari konflik. Dari segi waktu, rembuk pekon sebagai pengatur strategi dikatakan sudah sangat efisien karena upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat meminimalisir terjadinya konflik. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena warga dapat menjalankan rutinitas dengan aman.

Meskipun demikian, pelaksanaan media rembuk pekon di Pekon Way Suluh kaitannya sebagai pengatur strategi masih harus perlu diperbaiki. Koordinasi antar

aparatur pekon dan pemuda masih sangat rendah. Kurangnya koneksitas yang baik antara warga dan Aparatur pekon dalam memberikan tambahan wawasan terhadap dampak dari pelaksanaan rembuk pekon sendiri baik waktu, proses, dan biaya yang dirasa masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat.

Hal ini dapat menjadi salah satu rujukan apabila terjadi suatu pertikaian, permasalahan, masyarakat sudah mengetahui langkah apa yang harus ditempuh sehingga masyarakat terhindar dari kekerasan fisik, tindakan main hakim sendiri dan mendapatkan pengetahuan atau kesadaran tentang penyelesaian masalah melalui musyawarah. Oleh sebab itu upaya pencegahan dalam bentuk manajemen konflik dalam hal ini sangat diperlukan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan kegiatan kepemudaan terutama yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan.

Media Rembuk Pekon Sebagai Komunikator dan Mediator

Pada indikator rembuk pekon diharapkan mampu menjadi mediator dan komunitor yang adil dan tanpa memihak. Seperti halnya pada pembahasan sebelumnya, media rembuk pekon sebagai komunikator dan mediator sangat menekankan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan rembuk pekon, seperti aparat pekon, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Fungsi komunikator dan mediator tersebut sangat diperankan ketiga tokoh tersebut sehingga prinsip keadilan menjadi prioritas utama.

Bedasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dengan pertanyaan yang sesuai dengan indikator tersebut. Pelaksanaan media rembuk pekon sebagai mediator dan komunikator sudah baik. Hasil wawancara terhadap aparat pekon menyatakan bahwa, *"...dalam melakukan mediasi dan komunikasi, kami mempertemukan kedua belah pihak, mencari penyebab konflik, dan menjadi penengah, meskipun itu teman atau bahkan saudara sekalipun kami tetap berlaku sama, tidak berat sebelah"*. Sejalan dengan pernyataan tersebut, tokoh adat menyatakan *"...sebagai pamatan tentu kami akan dalam mengambil keputusan kami tidak akan selalu adil, kalau salah kami katakan salah, kalau benar kami katakan benar, tidak ada pihak yang dirugikan"*. Berdasarkan pernyataan kedua tokoh fungsi mediator dan komunikator di Pekon Way Suluh dilaksanakan dengan prinsip keadilan.

Peran komunikator dan mediator yang dilaksanakan oleh aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi acuan bagi peneliti untuk menilai bahwa efektivitas media rembuk di Pekon Way Suluh sudah berjalan dengan baik. meskipun sudah dapat dikatakan baik. Dari segi kualitas, pada indikator komunikator dan mediator, aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah melakukan penyelesaian masalah dengan adil dan tidak memihak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi komunikator dan sudah tepat sasaran. Dari segi dampak, mediasi dan komunikasi yang dilakukan oleh aparat pekon, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penengah untuk mendamaikan pihak yang terlibat konflik memberikan pengaruh bagi warga untuk terhindar dari konflik. Dari segi waktu, rembuk pekon sebagai komunikator dan mediator dikatakan sudah sangat efisien karena peran mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik akan mengutamakan kekeluargaan sehingga penyelesaian masalah tidak membutuhkan waktu yang lama.

Efektivitas peran komunikator dan mediator tersebut, tidak serta merta didukung atau diterima oleh seluruh warga terlebih pada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang puas terhadap keputusan tersebut. Ditemukan beberapa kasus, dimana warga yang terlibat konflik merasa bahwa keputusan

yang diambil dianggap menguntungkan sebelah pihak. Setelah dianalisis lebih mendalam kepada pihak-pihak tersebut, ternyata warga belum memahami kegiatan mediasi itu sendiri. Karena pada hakekatnya pelaksanaan rembuk pekon bukan untuk mencari yang benar atau yang salah. Bukan juga untuk menghukum salah satu orang yang terlibat konflik. Tapi kegiatan mediator dan komunikator lebih memfasilitasi warga untuk introspeksi diri dan mengendalikan emosi agar terhindar dari perselisihan.

Pemahaman akan komunikasi antarwarga menjadi hal yang sangat penting untuk dijalin untuk menekan sikap egois dan memupuk sikap tenggang rasa. Aparatur pekon seharusnya lebih meningkatkan tindakan pencegahan sebelum terjadinya konflik. Selain itu diperlukan juga pihak yang mengetahui hukum dalam hal ini kepolisian. Sehingga dalam mengambil keputusan tidak menyalahi aturan hukum.

Media Rembuk Pekon Sebagai Pemberdayaan

Pemberdayaan warga merupakan salah satu fungsi media rembuk pekon. Pada indikator ini rembuk pekon diharapkan bukan hanya mampu menyikapi dengan bijak dan memberikan penyelesaian masyarakat masyarakat tetapi juga pemberdayaan dalam menyusun anggaran desa dan kebijakan lain dalam pengambilan keputusan bersama agar mencapai kata mufakat. Selain itu pemberdayaan yang dimaksud disini bagaimana media rembuk pekon dapat memaksimalkan potensi warga untuk memajukan kualitas hidup, bukan hanya kualitas sosial tetapi juga kualitas ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa warga, tokoh masyarakat, aparat pekon, dan tokoh adat dengan item pertanyaan "*Apakah Bapak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui rembuk pekon?*". Hasil analisis peneliti tentang media rembuk pekon sebagai upaya pemberdayaan kepada warga sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan aparat pekon yang menyatakan bahwa "*...ada kegiatan sosialisasi misalnya tentang pnpm mandiri, atau sosialisasi tentang kesehatan*". Sejalan dengan hal tersebut tokoh adat menyatakan bahwa "*...kami melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu dengan bagian dari PKK*". Selain itu warga yang menyatakan bahwa "*...kami pernah dikumpulkan untuk kegiatan pnpm mandiri untuk buat usaha*". Pernyataan beberapa informan tersebut mencerminkan media rembuk pekon di Pekon Way Suluh sebagai pemberdayaan lebih menekankan pada kegiatan sosial dan ekonomi.

Kebermanfaatn kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk menilai efektifitas media rembuk pekon sebagai pemberdayaan. Dari segi kualitas, pada indikator pemberdayaan, aparat pekon sudah melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga, baik dalam berupa sosialisasi ataupun pelatihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran media rembuk pekon sebagai pemberdayaan sudah tepat sasaran. Dari segi dampak, kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tentu sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi warga karena pemberdayaan tersebut memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup atau bahkan penghasilan warga. Dari segi waktu, media rembuk pekon sebagai pemberdayaan yang telah dilaksanakan aparat pekon langsung kepada warga tanpa harus menunggu pelatihan-pelatihan dari berbagai lembaga atau dinas terkait. Selain itu, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh aparat pekon yang *notabene* merupakan warga di pekon tersebut maka dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan keadaan dan waktu warga.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentu belum dapat dikatakan sempurna. Meskipun aparat pekon melaksanakan pelatihan, sosialisasi kesehatan, dan program

kegiatan yang bertujuan mengedukasi warga. Meskipun kegiatan tersebut sangat menunjang kemampuan warga. Namun masih ada beberapa aparatur pekon yang belum melaksanakan fungsinya. Tentunya ini menjadi kendala bagi pelaksanaan program yang berhubungan dengan pemberdayaan. Akibat hal tersebut beberapa warga menjadi apatis untuk mengikuti program yang diadakan oleh aparat pekon. Sikap beberapa masyarakat yang acuh tak acuh dalam kegiatan dan penentuan kebijakan hanya sebagian yang menggunakan musyawarah. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan lembaga terkait untuk menanggulangi masalah tersebut agar seluruh aparat pekon dan warga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, media rembuk pekon yang dilaksanakan di pekon Way Suluh secara keseluruhan sudah tepat sasaran. Media rembuk pekon yang dilaksanakan terbukti dapat dan menanggulangi konflik. Sebagai pengambil keputusan, media rembuk pekon mampu menampung aspirasi warga sehingga dalam mengatur strategi dalam melaksanakan upaya pencegahan konflik. Selain upaya pencegahan, penyelesaian konflik dengan media rembuk pekon sebagai komunikator dan mediator dapat menjadi penengah yang terbukti dapat mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Bukan hanya perihal konflik, media rembuk pekon memiliki peran sebagai pemberdayaan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga di Pekon Way Suluh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara implementatif maupun regulatif dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Rembuk Pekon merupakan salah satu media penyelesaian masalah social yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang sangat heterogen kultur masyarakatnya seperti: masyarakat Lampung, dan secara umum bagi masyarakat Indonesia yang plural. Penanganan masalah konflik harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa sebagai bentuk upaya nyata menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana amanah UU No. 7 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Konflik Sosial dinyatakan bahwa "...Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik". Masyarakat perlu didampingi secara baik oleh pihak-pihak terkait (penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda). Pihak-pihak tersebut dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar melaksanakan rembuk pekon sebagai langkah awal dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran antara lain:

Pemerintah ataupun lembaga terkait dapat melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat, karena program rembuk pekon bukan hanya sebagai salah satu cara pengendali konflik sosial tetapi juga pemberdayaan dalam program di masyarakat. Semua permasalahan ataupun program yang merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengaplikasikannya dengan sebaik mungkin. Perlunya peranan aparatur pekon atau lembaga masyarakat untuk diperankan secara maksimal yaitu:

- a) Aparatur pekon, yaitu kepala pekon dan jajarannya dapat memberikan peraturan, pengarahan untuk masyarakat agar menjadi tertib dalam bertingkah laku.
- b) Lembaga agama, yaitu para tokoh agama untuk memberikan pembinaan baik dengan metode ceramah, organisasi maupun secara langsung.
- c) Lembaga hukum, yaitu aparat penegak hukum atau polisi untuk dapat melaksanakan perannya dengan maksimal terkait peranan media rembuk pekon dalam penyelesaian masalah sosial sebagai langkah awal dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Mukhlis dan Yanzi Hermi. 2015. *Peranan Media Rembuk Pekon Sebagai Penyelesaian Masalah Pasca Konflik di Pagelaran Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung. Vol.3, No.7. hal 6.
- Herdiansyah, Haris.2012.*Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salema Humanika.
- Lexi J. Moleong. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rineka Cipta.
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.